



AKSI BERSAMA DESA

MENDESAK REVISI UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Jl. Janur 2 Blok C-4 Kel. Kelapa Dua Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat - DKI Jakarta
email: aksibersamadesa.indonesia@gmail.com - Hotline 082144099009

Jakarta, 28 Januari 2024

Nomor : 09/ABD-JILID III/I/2024
Lampiran : -
Perihal : **HIMBAUAN KESIAPAN MENGIKUTI AKSI JILID III
"MENDESAK REVISI UU DESA"**

Kepada Yang Terhormat

1. **Pimpinan Organisasi Desa Tingkat Propinsi, Kabupaten, Kecamatan se-Indonesia**
2. **Kepala Desa di Seluruh Indonesia**
3. **Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Seluruh Indonesia**
4. **Perangkat Desa di Seluruh Indonesia**
5. **Paguyuban Desa Tingkat Kabupaten/Kecamatan di Masing Masing Propinsi**
6. **Anggota Organisasi Kemasyarakatan Desa di Seluruh Indonesia**

Di Tempat

Salam Perjuangan, Desa Bersatu !!!

Saudara-saudara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, dan Anggota Organisasi Kemasyarakatan Desa di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Perjuangan Revisi UU Desa yang bertujuan **Mengokohkan Kedaulatan Desa, Kemajuan, dan Kesejahteraan Masyarakat Desa; Memperjuangkan Periodesasi Masa Jabatan; serta Peningkatan Kesejahteraan Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa.** Perlu kami sampaikan sebagai Pimpinan Organisasi Desa, bahwa hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang nyata dari Pimpinan DPR RI untuk melakukan Pembahasan dan Pengesahan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan Hak Inisiatif DPR RI.

Setelah 5 (lima) bulan disahkannya Revisi UU Desa sebagai Hak Inisiatif DPR RI melalui paripurna DPR RI tanggal 11 Juli 2023, belum terlihat ada tindak lanjut yang nyata dan serius dari DPR RI untuk segera Mengesahkan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Padahal, pemerintah sudah mengirim Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan Surat Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas Bersama DPR RI pada tanggal 18 September 2023 dengan nomor surat R-45/Pres/09/2023.

Saudara-saudara Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, dan Anggota Organisasi Kemasyarakatan Desa di Seluruh Indonesia

Keseriusan perjuangan organisasi desa agar Revisi UU Desa segera disahkan telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo secara langsung pada 7 November 2023 dan 8 November 2023 oleh Ketua Organisasi Desa dan Pimpinan Organisasi Perangkat Desa. Presiden Jokowi menyampaikan siap untuk segera merevisi UU Desa, namun permintaan untuk pembahasan bersama dari DPR RI belum ada sampai saat ini.

Keseriusan perjuangan juga telah ditegaskan kepada Pimpinan DPR RI pada Aksi Bersama Desa Jilid I – 23 November 2023 dan Aksi Bersama Desa Jilid II – 5 Desember 2023. Dalam kesempatan tersebut juga disepakati Kesepakatan Pimpinan DPR RI bersama 8 Organisasi Desa Pusat yang menyebut **"Pimpinan DPR RI Berkomitmen Menyelesaikan Revisi UU Desa sebelum Pemilu 2024 dengan Melibatkan 8 Organisasi Desa Nasional dalam Tim Kerja Pembahasan"**. Kesepakatan ini ditandatangani oleh **Ketua DPR RI, Dr (HC.) Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI, Prof. Dr. H. Sufmi Dasco Ahmad** pada tanggal 5 Desember 2023 di Gedung DPR RI. Selain itu, sebagai upaya menyamakan persepsi DPR RI dan Pemerintah maka Pimpinan Organisasi Desa juga melakukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Dalam Negeri menyatakan siap melakukan percepatan untuk menyelesaikan pembahasan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 dan pandangan Menteri Dalam Negeri menyebutkan bahwa rapat finalisasi bersama DPR RI bisa diselesaikan sebelum pemilu tanggal 14 Februari 2024.



AKSI BERSAMA DESA

MENDESAK REVISI UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Jl. Janur 2 Blok C-4 Kel. Kelapa Dua Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat - DKI Jakarta
email: aksibersamadesa.indonesia@gmail.com - Hotline 082144099009

Namun, hingga saat ini, belum ada upaya serius dari Pimpinan DPR RI untuk menyelesaikan Revisi UU No. 6 Tahun 2014, termasuk belum ada undangan dari Pimpinan DPR RI kepada Pemerintah dan Tim Kerja yang beranggotakan Ketua/Perwakilan Organisasi Desa Tingkat Pusat untuk melakukan Pembahasan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehingga, Pimpinan Organisasi Desa Tingkat Pusat menilai DPR RI hanya mengumbar janji palsu dan tidak menepati janji untuk menyelesaikan Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Oleh karena itu, Pimpinan Organisasi yaitu DPP APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) yang merupakan organisasi Kepala Desa aktif, DPP AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), DPN PPD (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional), PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), PP PPD (Pengurus Pusat Persatuan Perangkat Desa Indonesia), KIB (Kepala Desa Indonesia Bersatu), dan PARADE NUSANTARA (Persatuan Rakyat Desa Nusantara) **SEPAKAT UNTUK MELAKUKAN AKSI BERSAMA DESA JILID III** pada :

Hari / Tanggal	: Rabu, 31 Januari 2024
Tempat	: Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta
Waktu	: Mulai Jam 10.00 – Selesai
Peserta	: 300.000 Orang (Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa, dan Masyarakat Desa se-Indonesia)
Agenda/Tema	: Mendesak Revisi UU Desa "DPR Bohong, DPR Ingkar Janji"

Untuk itu Kami mengajak seluruh Anggota Organisasi Desa untuk **BERSIAP-SIAP MENGEPUK GEDUNG DPR RI**. Mari perlihatkan kekuatan Desa. Mari gunakan seluruh kemampuan kita untuk hadir di **AKSI BERSAMA DESA JILID III**.

*Saudara-saudara **Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, dan Anggota Organisasi Kemasyarakatan Desa di Seluruh Indonesia***

Kami perlu sampaikan beberapa hal sehubungan dengan **Persiapan AKSI BERSAMA DESA JILID III KEPUNG DPR RI** yaitu :

1. Aksi Bersama Desa Jilid III adalah aksi untuk mempertegas bahwa DPR RI hanya menyebarkan Janji Palsu ke Desa Menjelang Pemilu 2024 jika Revisi UU Desa tidak kunjung dilakukan pembahasan dan pengesahan.
2. Diharapkan kehadiran peserta aksi dari seluruh Indonesia dengan partisipasi dan biaya masing-masing, dan dilarang membawa senjata tajam atau apapun yang dilarang oleh Undang-Undang saat menyampaikan aspirasi
3. Khusus Peserta aksi dari Pulau Jawa, diharapkan dapat hadir dengan 1 Bis Per-Desa (atau minimal 1 Bis Per-Kecamatan). Kehadiran peserta memakai bis dari setiap wilayah nantinya agar berkoordinasi dengan organisasi atau koordinator aksi nasional.
4. Kepada Organisasi dan/atau Paguyuban Desa yang tidak tercatat dalam barisan organisasi yang mengundang, diharapkan tetap hadir untuk berjuang bersama demi kepentingan Pembangunan dan Kemajuan Desa
5. Kehadiran diharapkan memakai baju dinas pemerintahan dan/atau pakaian organisasi. Tidak diperkenankan ada gambar, spanduk, bendera partai, pakaian yang mengarah pada partai politik atau capres tertentu, sebab ini adalah MURNI AKSI PERJUANGAN DESA.
6. Saudara-saudara yang akan hadir harus memiliki niat penuh bahwa ini adalah perjuangan Desa, sehingga Perbedaan organisasi jangan pernah dikedepankan tujuan kita hanya satu yakni **REVISI UU DESA HARGA MATI SEBELUM PEMILU 2024**.
7. Untuk koordinasi persiapan aksi nantinya agar dilaporkan ke LO Aksi Nasional yaitu Saudara Sunan Bukhari (082144099009)



AKSI BERSAMA DESA

MENDESAK REVISI UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Jl. Janur 2 Blok C-4 Kel. Kelapa Dua Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat - DKI Jakarta
email: aksibersamadesa.indonesia@gmail.com - Hotline 082144099009

Demikian himbuan ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kami harapkan agar Saudara-Saudara **BERSIAP SIAP MELAKUKAN AKSI BERSAMA DESA KEPUNG DPR RI "REVISI UU DESA HARGA MATI SEBELUM PEMILU"** Satukan semangat dan kekuatan desa. Terima kasih.

Jakarta, 28 Januari 2024

AKSI BERSAMA DESA JILID III DALAM RANGKA REVISI REVISI UNDANG UNDANG DESA



H. Surta Wijaya, S.P.D., M.Si
Ketua Umum APDESI



Irawadi
Ketua Umum AKSI



Ir. H. Indra Utama, M. PWK
Ketua Umum ABEPEDNAS



Widhi Hartono, SE.
Ketua Umum DPN PPDI



Wardana, SH., M.Kn
Ketua Umum Parade Nusantara



Ferry Radiansyah, ST., MM.
Ketua Umum PABPDSI



Pandoyo
Ketua Umum KIB



Mon. Tahrii, S.Pd
Ketua Umum PP PPDI

Tembusan :

1. Koordinator Nasional Desa Bersatu
2. Arsip